

PARTISIPASI PEMILIH DI KECAMATAN PONTIANAK SELATAN KOTA PONTIANAK DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2014

Oleh:
AZIS PANDHU WICAKSONO
NIM. E1051131003

Dr. Nurfitri Nugrahaningsih,S.IP.,M.Si , Dewi Utami,S.IP.,M.S

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2017
2. Dosen Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2017

Email: azispandhu2049@gmail.com

Abstrak

Penulisan Skripsi ini bersumber dari tingkat Partisipasi Pemilih di Kecamatan Pontianak Selatan yang rendah dari pada kecamatan lainnya di Kota Pontianak pada saat pemilihan Legislatif tahun 2014 dan Skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi pemilih di Kecamatan Pontianak Selatan. Penulisan ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa rendahnya tingkat partisipasi pemilih di Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2014 disebabkan beberapa faktor di antaranya yaitu pertama faktor internal yang meliputi faktor teknis dan faktor pekerjaan, kedua faktor eksternal yang meliputi faktor administratif, faktor sosialisasi dan faktor politik, dari beberapa faktor tersebut yang paling dominan yang ditemukan dilapangan adalah faktor administratif dan faktor politik.

Kata-kata kunci : Pemilihan Legislatif, Partisipasi Politik

PARTICIPATION OF VOTERS PONTIANAK SELATAN SUB-DISTRICT IN LEGISLATIVE ELECTION IN 2014

Abstract

It was found that the level of voters participation in sub-district of Pontianak Selatan were lower than in other areas in Pontianak in legislative election in 2014. The thesis aimed to find out factors affecting voters participation in sub-district of Pontianak Selatan. This work employed descriptive qualitative methodology. Research finding showed that the participation of voters were lower in legislative election in 2014 because of two factors internal (technical things dan occupation) and external (administration, socialization, and politics) factors. Of these factors, administrative and political factors were the main cause of this problem.

Keywords: Legislative Election, Political Participation

A. PENDAHULUAN

Rendahnya tingkat partisipasi pemilih yang tidak menggunakan hak pilih dapat diakibatkan oleh banyak faktor, misalnya dampak yang dihasilkan pemilu tidak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat, perbaikan dan peningkatan kesejahteraan yang terjadi sebelum dan paska pemilu tidak terjadi secara signifikan, atau pun tidak aksesibelnya perangkat pemungutan suara. Beranjak dari pemahaman tersebut, maka rendahnya partisipasi pemilih tidak dapat dianggap sebagai wujud dari rendahnya kedewasaan berpolitik masyarakat.

Masalah partisipasi politik menjadi bahasan yang menarik untuk dijadikan bahan tulisan dan penelitian dari para pemerhati masalah social politik, karena partisipasi politik membahas secara langsung keterlibatan seluruh elemen atau objek politik dalam kegiatan perpolitikan. Dalam partisipasi politik diperlukan adanya keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam kehidupan politik, oleh karena itu partisipasi politik pemilih dalam pemberian suara dapat pula disajikan sebagai indikator peran masyarakat mensukseskan kegiatan politik.

Pemilihan legislative merupakan sarana yang paling tepat digunakan oleh masyarakat saat ini guna menyeleksi

calon-calon pemimpin yang mampu membawa perubahan, kemajuan dan perkembangan bagi daerah dan masyarakatnya. Partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pemilihan legislative dapat menjadi kunci penentu keberhasilan pencapaian tujuan, manakala masyarakat secara sadar dan bertanggung jawab mampu mengamati visi dan misi kandidat calon legislative ketika menyampaikan program kampanye, dengan mengetahui latar belakang riwayat hidup kandidat, sampai pada memutuskan calon legislative yang akan dipilih.

Antusiasme masyarakat dalam menyambut pemilihan legislative masih ada beberapa wilayah seiring dengan adanya harapan baru terhadap berubahnya kondisi social dan ekonomi mereka. Otonomi daerah memberikan ruang yang cukup luas kepada masyarakat di daerah untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik pemilihan legislative. Misalnya terlihat keikutsertaan mereka dalam keanggotaan tim sukses, kehadiran saat kampanye, dan kehadiran mereka di Tempat Pemungutan Suara (TPS), untuk memberikan suara.

Dalam hal ini, masyarakat adalah komponen penentu berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemilu. Karena pada dasarnya, hanya kekuatan pemilihan masyarakatlah

yang bisa menentukan nasib Negara dan bangsa kedepannya. Setiap warga Negara, apapun latar belakangnya seperti suku, agama, ras, jenis kelamin, status social, dan golongan, mereka memiliki hak yang sama untuk berserikat dan berkumpul, menyatakan pendapat, menyikapi secara kritis kebijakan pemerintah dan pejabat Negara. Hak ini disebut hak politik secara luas dapat langsung diaplikasikan secara kongkrit melalui pemilihan umum.

Beranjak dari hal tersebut, relatif rendahnya tingkat partisipasi politik pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada pileg dapat diakibatkan oleh berbagai penyebab, seperti hasil dari pileg yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat hingga berujung dengan penyesalan, peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak terjamin setelah selesainya pileg berlangsung. Maka dari itu, rendahnya partisipasi pemilih dalam menggunakan hak suara pilih tidak bisa dikatakan sebagai dampak dari rendahnya tingkat pengetahuan pemilih terhadap politik.

Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pileg. Bisa dikatakan, bahwa masa depan pejabat politik yang terpilih dalam suatu pileg tergantung pada preferensi masyarakat

sebagai pemilih. Tidak hanya itu, partisipasi politik pemilih dalam pileg dapat dipandang sebagai kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan. Kontrol yang diberikan beragam, tergantung dengan tingkat partisipasi politik masing-masing. Selain sebagai inti dari demokrasi, partisipasi politik juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak politik warga Negara.

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi dan partisipasi adalah orang yang paling tahu dengan apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakatm warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik.

Oleh karena itu penelitian ini berupaya menganalisis rendahnya tingkat partisipasi pemilih di Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak dalam Pemilihan Legislatif tahun 2014. Penelitian ini menarik untuk dianalisis karena pelaksanaan Pemilihan Legislatif tahun 2014 khususnya di Kecamatan Pontianak Selatan menjadi paling rendah dibandingkan dengan Pemilihan Presiden, Pemilihan Walikota, dan Pemilihan Gubernur.

Sebelumnya dalam pelaksanaan Pemilihan dari tahun ke tahun telah dilaksanakan Pemilihan Umum untuk tingkat kota, provinsi, maupun pusat. Salah satu contoh Masyarakat pemilih di Kecamatan Pontianak Selatan yang merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kota Pontianak telah ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Umum tersebut. Bentuk kegiatan yang dilakukan dalam Pemilihan Umum seperti kampanye, menjadi tim sukses, dan menjadi saksi atau pengawas pada saat pemilihan berlangsung serta memberikan suaranya untuk setiap kandidat yang diinginkannya.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini masalah yaitu “Faktor-faktor apa saja penyebab rendahnya partisipasi pemilih dalam pemilihan legislatif di Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak tahun 2014 paling rendah”.

B. KAJIAN TEORI

Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi politik

Merujuk pada pendapat Arianto (2011) bahwa alasan rendahnya partisipasi masyarakat untuk memilih diklasifikasikan menjadi 2 hal yakni Faktor Internal dan

Faktor Eksternal. Untuk lebih jelasnya dalam menjelaskan masalah tersebut berikut diuraikan sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Faktor Internal yaitu faktor yang berasal dari dalam yang mengakibatkan pemilih tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu. Adapun faktor internal itu sendiri meliputi 2 faktor utama yakni:

a. Faktor Teknis

Faktor teknis yang dimaksud adalah adanya kendala yang bersifat teknis yang dialami oleh pemilih sehingga menghalanginya untuk menggunakan hak pilih. Seperti pada saat hari pencoblosan pemilih sedang sakit, pemilih sedang ada kegiatan yang lain serta berbagai hal lainnya yang sifatnya menyangkut pribadi pemilih. Kondisi itulah yang secara teknis membuat pemilih tidak datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Faktor teknis ini dalam pemahaman dapat diklasifikasikan ke dalam dua hal yaitu teknis mutlak dan teknis yang bisa ditolerir. Teknis mutlak adalah kendala yang serta merta membuat pemilih tidak bisa hadir ke TPS seperti sakit yang membuat pemilih tidak bisa keluar rumah, ataupun sedang berada di luar kota. Kondisi yang seperti ini yang dimaksud teknis mutlak. Sedangkan teknis yang dapat ditolerir adalah permasalahan yang sifatnya

sederhana yang melakat pada pribadi pemilih yang mengakibatkan tidak datang ke TPS. Seperti ada keperluan keluarga, merencanakan liburan pada saat hari pemilihan. Pada kasus-kasus seperti ini dalam pemahaman penulis pemilih masih bisa mensiasatinya, yaitu dengan cara mendatangi TPS untuk menggunakan hak pilih terlebih dahulu baru melakukan aktivitas atau keperluan yang bersifat pribadi.

Pemilih golput karena alasan teknis yang tipe kedua ini cenderung tidak mengetahui esensi dari menggunakan hak pilih, sehingga lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada menggunakan hak pilihnya. Pemilih ideal harus mengetahui dampak dari satu suara yang diberikan dalam Pemilu. Hakikatnya suara yang diberikan itulah yang menentukan pemimpin lima tahun mendatang. Dengan memilih pemimpin yang baik berarti pemilih berkontribusi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik pula.

b. Faktor Pekerjaan

Faktor pekerjaan yang adalah pekerjaan sehari-hari pemilih. Faktor pekerjaan pemilih ini dalam pemahaman penulis memiliki kontribusi terhadap jumlah orang yang tidak memilih. Berdasarkan data

sensus Penduduk Indonesia tahun 2010 dari 107,41 juta orang yang bekerja, 15 paling banyak bekerja di sektor pertanian yaitu 42,83 juta orang (39,88 persen), disusul sektor perdagangan sebesar 22,21 juta orang (20,68 persen), dan sektor jasa kemasyarakatan sebesar 15,62 juta orang (14,54 persen). Data di atas menunjukkan sebagian besar penduduk Indonesia bekerja di sektor informal, dimana penghasilannya sangat terkait dengan intensitasnya bekerja. Banyak dari sektor informal yang baru mendapatkan penghasilan ketika mereka bekerja, tidak bekerja berarti tidak ada penghasilan. Kemudian ada pekerjaan masyarakat yang mengharuskan mereka untuk meninggalkan tempat tinggalnya seperti para pebisnis, pelaut atau penggali tambang. Kondisi seperti membuat mereka harus tidak memilih, karena faktor lokasi mereka bekerja yang jauh dari TPS.

Maka dalam pemahaman penulis faktor pekerjaan cukup signifikan yang mempengaruhi partisipasi pemilih dalam sebuah pemilihan umum. Pemilih dalam kondisi seperti ini dihadapkan pada dua pilihan menggunakan hak pilih yang akan mengancam berkurang penghasilannya atau pergi bekerja dan tidak memilih.

2.Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar yang mengakibatkan pemilih tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu. Ada tiga yang masuk pada kategori ini menurut pemilih yaitu aspek administratif, sosialisasi dan politik.

a. Faktor Administratif

Faktor administratif adalah faktor yang berkaitan dengan aspek administrasi yang mengakibatkan pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Diantaranya tidak terdata sebagai pemilih, tidak mendapatkan kartu pemilihan tidak memiliki identitas kependudukan (KTP). Hal-Hal administratif seperti inilah yang membuat pemilih tidak bisa ikut dalam pemilihan. Pemilih tidak akan bisa menggunakan hak pilih jika tidak terdaftar sebagai pemilih. Kasus Pemilu legislatif 2009 adalah buktinya banyaknya masyarakat Indonesia yang tidak bisa ikut dalam Pemilu karena tidak terdaftar sebagai pemilih. Jika kondisi yang seperti ini terjadi maka secara otomatis masyarakat akan tergabung kedalam kategori golput.

Faktor berikut yang menjadi penghalang dari aspek administrasi Adalah permasalahan kartu identitas. Masih ada masyarakat tidak memiliki KTP. Jika masyarakat tidak memiliki KTP maka tidak

akan terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap) karena secara administratif KTP yang menjadi rujukan dalam mendata dan membuat DPT. Maka masyarakat baru bisa terdaftar sebagai pemilih minimal sudah tinggal 6 bulan disatu tempat.

Golput yang diakibat oleh faktor administratif ini bisa diminimalisir jika para petugas pendata pemilih melakukan pendataan secara benar dan maksimal untuk mendatangi rumah-rumah pemilih. Selain itu dituntut inisiatif masyarakat untuk mendatangi petugas pendataan untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih. Langkah berikutnya DPS (Daftar Pemilih Sementara) harus tempel di tempat-tempat strategis agar bisa dibaca oleh masyarakat. Masyarakat juga harus berinisiatif melacak namanya di DPS, jika belum terdaftar segera melapor ke pengurus RT atau petugas pendataan. Langkah berikut untuk menimalisir terjadi golput karena aspek administrasi adalah dengan memanfaatkan data kependudukan berbasis IT. Upaya Elektoronik Kartu Tanda Penduduk (EKTP) yang dilakukan pemerintahan sekarang dalam pandangan penulis sangat efektif dalam menimalisir golput administratif.

b. Faktor Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan dalam rangka meminimalisir golput. Hal ini disebabkan

intensitas Pemilu di Indonesia cukup tinggi mulai dari memilih Kepala Desa, Bupati/Walikota, Gubernur Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden hal ini belum dimasukkan pemilihan yang lebih kecil RT/RW.

Kondisi lain yang mendorong sosialisasi sangat penting dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah dalam setiap Pemilu terutama Pemilu di era reformasi selalu diikuti oleh sebagian peserta Pemilu yang berbeda. Pada Pemilu 1999 diikuti sebanyak 48 partai politik, pada Pemilu 2004 diikuti oleh 24 partai politik dan Pemilu 2009 diikuti oleh 41 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal di Aceh. Kondisi ini menuntut perlunya sosialisasi terhadap masyarakat. Permasalahan berikut yang menuntut perlunya sosialisasi adalah mekanisme pemilihan yang berbeda antara Pemilu sebelum reformasi dengan Pemilu sebelumnya. Dimana pada era orde baru hanya memilih lambang partai sementara sekarang selain memilih lambang juga harus memilih nama salah satu calon di partai tersebut. Perubahan yang signifikan adalah pada Pemilu 2009 dimana kita tidak lagi mencoblos dalam memilih tetapi dengan cara menandai. Kondisi ini semualah yang menuntut pentingnya sosialisasi dalam rangka menyelesaikan pelaksanaan Pemilu

dan meminimalisir angka golput dalam setiap Pemilu. Terlepas dari itu semua penduduk di Indonesia sebagai besar berada di pedesaan maka menyebar luaskan informasi Pemilu dinilai penting, apalagi bagi masyarakat yang jauh dari akses transportasi dan informasi, maka sosiliasi dari mulut ke mulut menjadi faktor kunci mengurangi angka golput.

c. Faktor Politik

Faktor politik adalah alasan atau penyebab yang ditimbulkan oleh aspek politik masyarakat tidak mau memilih. Seperti ketidakpercayaan dengan partai, tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tak percaya bahwa Pemilu/ Pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan. Kondisi inilah yang mendorong masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Stigma politik itu kotor, jahat, menghalalkan segala cara dan lain sebagainya memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap politik sehingga membuat masyarakat enggan untuk menggunakan hak pilih. Stigma ini terbentuk karena tabiat sebagian politisi yang masuk pada kategori politik instan. Para pelaku politik punya kecenderungan baru mendekati masyarakat ketika akan ada agenda politik seperti Pemilu. Maka kondisi ini meruntuhkan kepercayaan masyarakat pada politisi itu

sendiri. Faktor lain adalah para politisi yang tidak mengakar, politisi yang tidak dekat dan tidak memperjuangkan aspirasi rakyat. Sebagian politisi lebih dekat dengan para petinggi partai, dengan pemegang kekuasaan. Mereka lebih mengantungkan diri pada pemimpinnya di bandingkan mendekatkan diri dengan konstituen atau pemilihnya. Kondisi lain adalah tingkah laku politisi yang banyak berkonflik mulai konflik internal partai dalam mendapatkan jabatan strategis di partai, kemudian konflik dengan politisi lain yang berbeda partai. Konflik seperti ini menimbulkan antipati masyarakat terhadap partai politik itu sendiri. Idealnya konflik yang di tampilkan para politisi seharusnya tetap mengedepankan etika

politik untuk menjaga kewibawaan politik dan kepercayaan masyarakat.

Politik pragmatisme yang semakin menguat, baik dikalangan politisi maupun di sebagian masyarakat. Para politisi hanya mencari keuntungan sesaat dengan cara mendapatkan suara rakyat. Sedangkan sebagian masyarakat kita, politik dengan melakukan transaksi semakin menjadi-jadi. Baru mau mendukung, memilih jika ada mendapatkan keuntungan materi, maka muncul ungkapan kalau tidak sekarang kapan lagi, kalau sudah jadi/terpilih mereka

akan lupa janji. Kondisi-kondisi yang telah diuraikan ini yang secara politik memengaruhi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Sebagian Masyarakat semakin tidak yakin dengan politisi. Harus diakui tidak semua politisi seperti ini, masih banyak politisi yang baik, namun mereka yang baik tenggelam dikalahkan politisi yang tidak baik.

Dalam penelitian ini terlihat tingkat partisipasi politik pemilih di Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak masih rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti pertama, faktor internal yaitu faktor yang mempengaruhi dari dalam sehingga pemilih tidak menggunakan hak pilihnya, yang meliputi faktor teknis dan faktor pekerjaan.

Kedua, faktor eksternal yaitu faktor yang mempengaruhi dari luar, yang meliputi faktor administrative, sosialisasi dan faktor politik.. Kondisi inilah yang mendorong masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Pandangan masyarakat terhadap politik itu kotor, jahat, menghalalkan segala cara dan lain sebagainya memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap politik. Sehingga membuat masyarakat enggan untuk menggunakan hak pilih. Pandangan ini terbentuk karena sikap sebagian politisi yang masuk pada kategori politik instan

yakni baru akan mendekati masyarakat disaat adanya agenda politik seperti pemilu. Maka kondisi ini meruntuhkan kepercayaan masyarakat pada politisi. Dalam hal ini metode yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan situasi tertentu, sikap, perilaku, pandangan, fenomena, dan proses yang berlangsung di lokasi penelitian.

Dengan hal ini diperoleh prediksi hasil penelitian yaitu mengetahui faktor -faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat di Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak. Adapun hasil penelitian yang dicapai dapat di rekomendasikan guna meningkatnya partisipasi Masyarakat khusus nya Di Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak pada Pemilu selanjutnya.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian dengan judul “Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Legislatif di Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak Tahun 2014” ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif, dengan menggunakan metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong,

2007:4), mengatakan bahwa penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Selanjutnya dijelaskan oleh David Williams (dalam Moleong 2007:5) mengemukakan bahwa “penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah”.

Menurut Moleong (2007:6) penelitian kualitatif adalah “penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah”.

Penelitian kualitatif dapat dikatakan sebagai rangkaian kegiatan atau proses penjangkaran informasi pada kondisi sewajarnya, setelah itu dihubungkan pada pemecahan masalah baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Maka dari itu tujuan dari dasar penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat

menyangkut fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diteliti.

bahwa permasalahan utama dalam pemilihan legislatif tahun 2014 ini adalah dalam hal pendataan yang tidak sepenuhnya akurat.

D. HASIL PENELITIAN

1. Faktor internal

Faktor yang paling dominan dalam faktor internal yaitu faktor pekerjaan. Dimana faktor pekerjaan menjadi salah satu jawaban yang paling banyak di ungkapkan oleh masyarakat yang telah diwawancarai. Hal ini terjadi karena kebanyakan masyarakat kebanyakan khususnya di daerah kecamatan Pontianak selatan bekerja pada sektor swasta dan wiraswasta dimana faktor tersebut menjadi alasan utama yang tidak bisa ditinggalkan pada pelaksanaan pemilu tersebut berlangsung.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang meliputi faktor administrasi merupakan faktor yang paling dominan yang mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih di Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak dalam Pemilihan Legislatif. Hal ini di buktikan dari hasil wawancara oleh PPK (Panitia Pemungutan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) yang menjelaskan

E. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan penyebab rendahnya tingkat partisipasi pemilih di Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak pada pemilihan Legislatif tahun 2014 diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Faktor internal

a) Faktor teknis

yang dimaksud adalah adanya kendala yang bersifat teknis yang dialami oleh pemilih sehingga menghalanginya untuk menggunakan hak pilih. Seperti pada saat hari pencoblosan pemilih sedang sakit, pemilih sedang ada kegiatan yang lain serta berbagai hal lainnya yang sifatnya menyangkut pribadi pemilih. Kondisi itulah yang secara teknis membuat pemilih tidak datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya.

b) Faktor Pekerjaan

yang mengakibatkan pemilih tidak menggunakan hak pilihnya yang dimiliki

karena tuntutan pekerjaan merupakan tuntutan yang paling mendesak bagi sebagian pemilih yang apabila dihadapkan pada pilihan antara harus bekerja atau membuka usaha yang mereka miliki, dibandingkan dengan datang ke TPS untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, maka mereka lebih memilih untuk bekerja dan mengejar kebutuhan hidup mereka. Mengingat sebagian besar masyarakat di Indonesia bekerja di sektor-sektor swasta atau informal dimana sektor ini biasanya lebih mementingkan intensitas kerja dan keuntungan atau penghasilannya. Sebagian pemilih merasakan adanya kerugian yang dialami jika mereka ikut serta dalam pemilihan Legislatif menjadi pertimbangan mereka sehingga pemilih tidak ikut serta berpartisipasi dalam pileg tersebut.

2. Faktor Eksternal

a) Faktor administratif mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi pemilih di Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak diakibatkan oleh beberapa alasan seperti: banyaknya pemilih yang pindah tempat tinggal namun masih terdaftar dalam DPT sehingga menimbulkan pemilih ganda dan ada masyarakat yang sudah meninggal namun masih terdaftar dalam DPT.

b) Faktor sosialisasi menjadi penyebab rendahnya tingkat partisipasi pemilih karena kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh para calon ataupun tim suksesnya sehingga pemilih kurang mengetahui tentang siapa dan apa visi-misi yang ingin dilaksanakan jika para calon tersebut berhasil duduk di pemerintahan. Sehingga masyarakat enggan untuk menggunakan hak pilihnya.

c) Faktor politik mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi pemilih disebabkan pandangan masyarakat tentang politik itu kotor, jahat, menghalalkan segala cara dan lain sebagainya memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap politik sehingga membuat pemilih enggan untuk menggunakan hak pilih. Stigma ini terbentuk karena tabiat sebagian politisi yang masuk pada kategori politik instan. Para pelaku politik punya kecenderungan baru mendekati pemilih ketika akan ada agenda politik seperti Pemilu dan ada juga yang menggunakan uangnya untuk membeli suara pemilih namun memang sulit untuk membuktikannya. Maka kondisi ini meruntuhkan kepercayaan pemilih pada politisi itu sendiri.

F. SARAN

Setelah mengemukakan beberapa kesimpulan diatas maka penulis akan mencoba memberikan beberapa saran untuk meningkatkan partisipasi pemilih untuk pemilu selanjutnya. Adapun saran yang ingin dikemukakan penulis disini sebagai berikut:

1. Faktor Internal

a) Faktor Teknis

Faktor teknis sebenarnya dapat diatasi dengan adanya kesadaran diri dari pemilih itu sendiri untuk dapat membagi waktu agar dapat menggunakan hak pilihnya. Karena dalam melakukan pemilihan tidak memakan waktu yang cukup lama.

b) Faktor Pekerjaan

Faktor pekerjaan sebaiknya dapat dibatasi oleh pemilih karena dalam hal pemilihan umum KPU telah memberikan keringanan kepada perusahaan atau kantor-kantor agar karyawan/pemilih untuk menggunakan hak suaranya terlebih dahulu baru pergi ke urusan pekerjaan.

2. Faktor Eksternal

a) Faktor Administratif

Faktor Administratif Ini sebenarnya adalah tugas dan tanggung jawab semua pihak baik itu penyelenggara pileg maupun pemilih itu sendiri. Namun tugas ini lebih ditanggungkan kepada penyelenggara

pemilu terutama ketua rt/KPPS setempat dimana ia sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan pileg didaerahnya agar warganya dapat terdata dengan akurat

b) Faktor Sosialisasi

Faktor Sosialisasi dapat diatasi dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Sebaiknya para calon itu yang turun langsung kelapangan untuk memberikan visi misi para calon kedepannya agar masyarakat dapat merasakan kesungguhan calon untuk mendengarkan aspirasi dari masyarakat bukan hanya memberikan janji-janji palsu.

c) Faktor Politik

Faktor ini disebabkan oleh pandangan masyarakat terhadap para calon-calon yang ingin duduk di pemerintahan dengan cara yang instan dan memandang bahwa politik itu kotor, jahat dan menghalalkan segala cara. Hal ini dapat diatasi dengan cara para calon dapat membuktikan apa saja yang telah disampaikan saat kampanye dapat terlaksana dengan baik sehingga masyarakat dapat memandang tidak semua politik itu kotor, jahat dan menghalalkan segala cara.

G. KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini tidak lepas dari kekurangan yang disebabkan oleh

keterbatasan-keterbatasan yang disebabkan oleh beberapa hal yaitu pada saat mencari data peneliti tidak bisa menemukan data-data mengenai nama dan jumlah warga yang terdata sebagai pemilih namun pada saat pemilihan Legislatif berlangsung warga tersebut ternyata telah pindah tempat tinggal maupun pemilih ganda. Karena pada saat pemilihan Legislatif berakhir semua berkas-berkas dari setiap KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) maupun PPS (Panitia Pemungutan Suara) telah diserahkan kembali kepada KPU Kota Pontianak.

Walaupun peneliti tidak dapat menemukan data-data mengenai nama-nama warga yang sudah pindah maupun pemilih ganda, peneliti masih dapat menemukan informasi tersebut melalui wawancara langsung dengan Ketua PPS (Panitia Pemungutan Suara) maupun Ketua KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara).

H. REFERENSI

Arianto, Bismar, Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih dalam Pemilu, Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 1, 2011, hal. 51-60.

Alfian.1992. Pemikiran Dan Perubahan Politik Indonesia.Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

Alfian.1986. Pembangunan Politik Indonesia.Jakarta : GramediaPustakaUtama

Budiarjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

Iskandar.2013. Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial. Jakarta : Referensi Jurnal Tata Loka. Semarang: Planologi UNDIP.

Kantaprawira, Rusadi. 1998, Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar, Bandung : CV Sinar Baru.

Moleong, Lexy, J. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

P. Huntington, Samuel dan Joan M. Nelson. 1997. Partisipasi Politik di Negara Berkembang. No Easy Choice : Political Participation In Developing Countries Cambridge. Mass : Harvard University Press.

Rahmat, Jalaludin. 2000. Komunikasi Politik. Bandung: Rosda.

Surbakti, Ramlan. 2010. Memahami Ilmu Politik. Jakarta : Grasindo

Sugiyono, 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D Cetakan ke-11.Bandung : ALFABETA

Syarbaini, Syahrial, 2002. Sosiologi dan Politik. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Dokumen-dokumen

Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 pada Bab IV pasal 19 ayat 1 dan 2 serta pasal 20 tentang pemilih

Undang-Undang Pemilu UU Tahun 2012

Skripsi:

Ilma Nur Amalia, Mahasiswa Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang 2015. Judul: Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Pesisir Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2014 (studi masyarakat Desa Bonang, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang).

Situs web:
<http://lib.unnes.ac.id/22715/1/3301411075.pdf>

Desy Mira Aryani, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman 2015. Studi tentang faktor-faktor penyebab rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu Presiden 2014 di Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda.

Situsweb: [ejournalDesy\(04-08-15-07-26-24\).docx](#)

Jurnal:

Arianto Bismar, Jurnal : Analisis Penyebab Masyarakat tidak memilih dalam Pemilu. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Situs web: http://fisip.umrah.ac.id/wp-content/uploads/2012/03/JURNAL-ILMU-PEMERINTAHAN-BARU-KOREKSI-last_57_66.pdf



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai civitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : AZIS PANDHU WICAKSONO
NIM / Periode lulus : E1051131003 / IV
Tanggal Lulus : 20-12-2017
Fakultas/ Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Ilmu Administrasi
Program Studi : Ilmu Politik
E-mail address/ HP : azis.pandhu2049@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Aspirasi*) pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

Partisipasi Pemilih di Kecamatan Pontianak Selatan Kota
Pontianak dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2014

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

☐ Secara *fulltext*

☒ *content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/ disetujui
Pengelola Jurnal

Sumadi, S.Sos, M.Si
NIP. 19 08 1957 021001

Catatan

*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

Dibuat di :
Pada tanggal : 24-08-2017

AZIS PANDHU WICAKSONO
NIM. E1051131003

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)